

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitualisme Di Indonesia*, Cetakan I, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi Dan Konstitualisme Di Indonesia*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- _____, *Menegakkan Tiang Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- _____, et.al, *Tugas dan Tantangan*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, *Mahkamah Konstitusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan I, Konpress dan Citra Media, Jakarta, 2006.
- Hadjar, Ahmad Fickar, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2003.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptha Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Natabaya, Ahmad Syarifuddin, *Menata Ulang Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Profil Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.

Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme Bom Bali.

Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Putusan Nomor 42/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Sumber Internet

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Ketiga, <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/88/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2012.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%2024%20th%202003%20MK.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2012.

Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 Tentang Tinadak Pidana Terorisme Bom Bali, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/PUTUSAN%20013_PUU-I_2003.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2012.

Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_21_2008.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2012.

Putusan Nomor 42/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_42_2008.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2012.

Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.StrukturOrganisasi>, diakses tanggal 16 Maret 2012.

E. Surat Kabar

Hadar Gumay, *Judicial Review Undang-Undang Pemilu Diajukan Ke Mahkamah Konstitusi*, Republika, 5 Oktober 2011.

F. Wawancara

H. Achmad Michdan, SH, Tim Pengacara Muslim, Jl. Pinang I No. 9 Pondok Labu Jakarta Selatan, 28 Mei 2012.

G. Kamus

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.